

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mempunyai sumber daya kelautan dan perikanan sangat melimpah. Garis pantai terpanjang di dunia sebesar 81.497 km dan total luas laut mencapai sekitar 5,8 juta km², terdiri dari 2,3 juta km² perairan kepulauan, 0,8 juta km² perairan teritorial, dan 2,7 km² perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Keadaan ini menempatkan sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi sebagai sektor strategis dalam pembangunan nasional (Badan Pusat Statistik, 2012).

Wilayah pesisir Indonesia merupakan pusat acuan keanekaragaman biota laut dunia, yaitu tempat tumbuh bakau dan terumbu karang serta memiliki potensi sumberdaya lain yang dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Rosyidie, 2006). Mayoritas masyarakat memanfaatkan wilayah pesisir sebagai mata pencaharian utama namun, kondisi sumber daya alam yang melimpah ini nyatanya, belum mampu mensejahterakan masyarakat (Natalia dan Muhammad, 2014).

Madura merupakan salah satu pulau yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Produktivitas perikanan tangkap di Madura sampai saat ini masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan, tingginya aktivitas *overfishing* yang dilakukan oleh nelayan. Tingginya penangkapan ikan yang dilakukan nelayan tidak diimbangi oleh jumlah hasil tangkap, sehingga pendapatan yang diperoleh menjadi rendah. Kondisiseperti ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan nelayan (Ihsanuddin dkk, 2013).

Sampang merupakan salah satu kabupaten di Pulau Madura yang memiliki potensi besar terhadap sektor perikanan khususnya perikanan tangkap. Jumlah produksi ikan tangkap pada tahun 2015 mencapai 37.204 ikan dengan perikanan laut sebesar 7.078 ikan, perairan umum sebesar 22.775 ikan, tambak sebesar 6.811 ikan, dan kolam sebesar 540 ikan (Badan Pusat Statistik, 2016). Kecamatan Sampang merupakan salah satu daerah di Kabupaten Sampang dengan jumlah produksi ikan tangkap yang cukup besar, hal ini dibuktikan dengan jumlah nelayan sebanyak 4.800 nelayan (Badan Pusat Statistik, 2016).

Jumlah populasi nelayan yang banyak ini menjadikan Kecamatan Sampang merupakan kecamatan padat nelayan.

Pulau Mandangin merupakan sentra produksi perikanan tangkap tertinggi di Kecamatan Sampang. Hal itu mengindikasikan bahwa masyarakat pulau mandangin didominasi oleh nelayan. Pada tahun 2013–2016, Jumlah produksi tangkapan ikan di Pulau Mandangin sebanyak 1,140 ton untuk nelayan besar (alat tangkap Seret, dengan ukuran kapal 12 GT-20 GT), sedangkan nelayan kecil sebesar 10,663 ton (alat tangkap eder, lojule, butek, dengan ukuran kapal 2GT-6GT) (Buku Desa Pulau Mandangin, 2016).

Hasil tangkapan ikan di Pulau Mandangin oleh nelayan cukup tinggi, tetapi nelayan tersebut belum sejahtera (di bawah garis kemiskinan). Hal ini dapat dibuktikan dari jumlah penduduk yang menerima beras untuk orang miskin (raskin) pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Jumlah Penerima Raskin di Pulau Mandangin

Tahun	Pra Sejahtera
2013	2.720
2014	2.908
2015	3.120
2016	3.500

Sumber; Buku Desa Pulau Mandangin, 2016

Kemiskinan yang ada di Pulau Mandangin semakin bertambah setiap tahunnya dan hampir seluruhnya penerima bantuan raskin tersebut adalah nelayan, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang profil nelayan dan apa saja strategi nafkah yang di lakukan oleh nelayan dalam mengatasi masalah pendapatan pada saat musim paceklik (tidak ada ikan).

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah profil kemiskinan di Pulau Mandangin ?
2. Strategi nafkah apa yang dijalankan oleh nelayan miskin yang ada di Pulau Mandangin?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui profil kemiskinan di Desa Pulau Mandangin?
2. Untuk mengetahui strategi nafkah yang dijalankan oleh nelayan miskin di Pulau Mandangin?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan untuk rujukan dalam penyempurnaan kebijakan lanjutan di wilayah terkait dan juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan sejenis wilayah lain
2. Bagi akademisi dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan acuan untuk melakukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan kemiskinan.

